

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar dan Malaysia sebagai negara tujuan utama. Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan, khususnya Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di sektor domestik. Masalah ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi warga negara yang bekerja di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia dari tindak kekerasan pada periode 2020-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik oleh James E. Anderson, yang mencakup perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 dan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Malaysia mengenai *One Channel System* (OSC). Namun jumlah pengaduan kekerasan mengalami fluktuasi sehingga diperlukan penguatan implementasi kebijakan, pengawasan di lapangan, serta peningkatan literasi hukum dan akses pengaduan bagi Pekerja Migran Indonesia di negara Malaysia.

Kata kunci: *pekerja migran Indonesia, kekerasan, Malaysia, kebijakan publik, perlindungan PMI*

ABSTRACT

Indonesia is the largest sending country of Indonesian Migrant Workers (PMI) and Malaysia is the main destination country. Indonesian migrant workers in Malaysia often experience various forms of violence, especially Indonesian migrant workers who work in the domestic sector. This problem shows the importance of the government's role in providing protection for citizens working abroad. This research aims to analyse the Indonesian Government's efforts to protect Indonesian Migrant Workers in Malaysia from violence in the 2020-2024 period. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through literature studies and direct interviews with the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI). The theory used in this research is the theory of public policy by James E. Anderson, which includes policy formulation, implementation, and evaluation. The results show that the Indonesian government has implemented various policies, such as Law No. 18/2017 and the Memorandum of Understanding (MoU) with Malaysia regarding the One Channel System (OSC). However, the number of complaints of violence fluctuates so it is necessary to strengthen policy implementation, supervision in the field, and increase legal literacy and access to complaints for Indonesian Migrant Workers in Malaysia.

Keywords: *Indonesian migrant workers, violence, Malaysia, public policy, PMI protection*